



***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT***

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
JL. A. SYAIRANI PELAIHARI  
TANAH LAUT- KALIMANTAN SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan. A. Syairani Komp Perkantoran Gagah Pelaihari 70814 Telp (0512) 21113

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**

**NOMOR : 900/ 042/ BPBD / 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019;
- MENINGAT** :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPAKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Melaksanakan terkait mekanisme Laporan Kinerja Pemerintah : Perencanaan, Pengumpulan data, Pengukuran kinerja, Pemantauan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
  - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam rapat berkala Triwulan (3 bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
  - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di** : Pelaihari  
**Pada Tanggal** : Januari 2020

---



Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana BPBD  
Kab.Tanah Laut

Nomor : 900/ / BPBD /2020

Tanggal : Januari 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	H. Muh. Kusri, SP NIP. 19690315 199803 1 012 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana BPBD Kab.Tanah Laut	Ketua	
2	Nuriah, S. Sos NIP. 1740320 199503 2 005 Penata Tk. I ( III/d )	Sekretaris Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Wakil Ketua	
3	Husairi, A.Md NIP. 19660505 199002 1 001 Penata Tk. I.( III/d )	Kasi Kedaruratan dan Logistik Pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
4	Ahmad Yanuar, ST NIP. 19660102 199303 1 008 Penata ( III/c )	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
5	Jainal Abidin, SP NIP. 19750510 201212 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Anggota	
6	Edy Siswoyo, A.Md NIP. 19821106 201502 1 001 Pengatur Tk. I ( II/d )	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	

KEPALA BPBD  
KABUPATEN TANAH LAUT





**PEMERINTAH DAERAH KAB TANAH LAUT**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**SEKRETARIS**

<b>Nomor SOP</b> 900/ /SOP.SEK/II/2019	<b>Tgl. Pembuatan</b> Januari 2019
	<b>Tgl. Revisi</b>
	<b>Tgl. Pengesahaan</b>
	<b>Disahkan oleh</b>  <b>KEPALA PELAKSANA</b>  <b>H. MUH. KUSRI, SP</b> NIP. 19690315 199803 1 012
<b>Nama SOP</b> <b>LAKIP</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Permenpan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP 2. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahanlampiran Permenpan Nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja	1. Memahami kebijakan mengenai LAKIP 2. Memiliki pemahaman tentang LAKIP 3. Memiliki kemampuan menganalisa LAKIP
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. RENSTRA SKPD      4. IKU SKPD 2. APBD 3. DPA	1. Pedoman penyusunan LAKIP 2. Perangkat komputer dengan instalasi program Microsoft Office, Archview dan koneksi internet 3. Memo / Disposisi
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
1. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh kasi yang terkait.	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual/order.

**( SOP ) PENYUSUNAN LAKIP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Tim Akuntabilitas	Kepala BPBD	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk membentuk Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				Perintah Kepala	30 menit	Data Tim Penyusun LAKIP	
2	Sekretaris selaku menangani keuangan melakukan koordinasi dengan Kasi – kasi terkait untuk keperluan data penyusunan LAKIP				Disposisi Penyusunan LAKIP	4 hari	Disposisi penyusunan LAKIP	
3	Menyusun draf LAKIP BPBD				Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP	
4	Kasi - Kasi menyampaikan draf penyusunan LAKIP kepada Sekretaris untuk dilakukan revidu dan analisis.				Draf LAKIP	30 menit	Revidu Draf LAKIP	
5	Hasil revidu dan analisis oleh Sekretaris di sampaikan ke Kepala sebagai bahan pembahasan dalam rapat				Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP	
6	Revisi draf LAKIP berdasar hasil rapat selanjutnya menyusun draf final LAKIP				Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP	
7	Revidu draf final LAKIP BPBD				Draf final LAKIP	1,5 jam	Draf final LAKIP	
8	Tanda Tangan Draf Final LAKIP BPBD				Draf final LAKIP	1 Jam	Draf final LAKIP	
9	Penyerahan LAKIP final BPBD untuk didistribusikan ke pihak terkait				LAKIP final	2 jam	LAKIP final	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, Januari 2020

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**



**H. MUH. KUSRI, SP**  
**NIP. 19690315 199803 1 012**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023.

Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menargetkan Capaian IKU Badan penanggulangan bencana Daerah sebesar 81,23 dalam dengan pridekat B atau memuaskan, Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya bebrbagai faktor di antaranya :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik yaitu Tim reaksi Cepat (TRC) dan Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan ( kotak saran, saluran telepon dan email )
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.
5. Inovasi percepatan pelayanan kebencanaan melalui piket harian yang dilakukan di Induk BPBD Kabupaten Tanah Laut walaupun pelayanan pada hari libur;

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2020

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**



**NIP. 19690315 199803 1 012**

	Hal
KATA PENGANTAR .....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	2
C. Produk dan Layanan.....	9
D. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
A. Visi RPJMD.....	13
B. Misi RPJMD.....	14
C. Tujuan Sesuai Renstra.....	16
D. Sasaran Strategis.....	16
E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan Target 5 Th)	17
F. Indikator Kinerja Utama.....	22
G. Program dan Kegiatan.....	22
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. CAPAIAN IKU.....	27
1. Target dan Capaian IKU .....	27
2. Uraian dan analisa Capaian IKU .....	29
B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS .....	36
1. Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target.....	36
2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis.....	38
3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis.....	44
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	49
1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019.....	49
- Belanja Langsung.....	49
- Belanja Tidak Langsung.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	54
LAMPIRAN	
1. IKU	
2. Pernyataan hasil Reviu Tahun 2019	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
4. Cascading/Pohon Kinerja	
5. Capaian per triwulan tahun 2019	
6. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2013 - 2018	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Tap. MPR RI No. 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

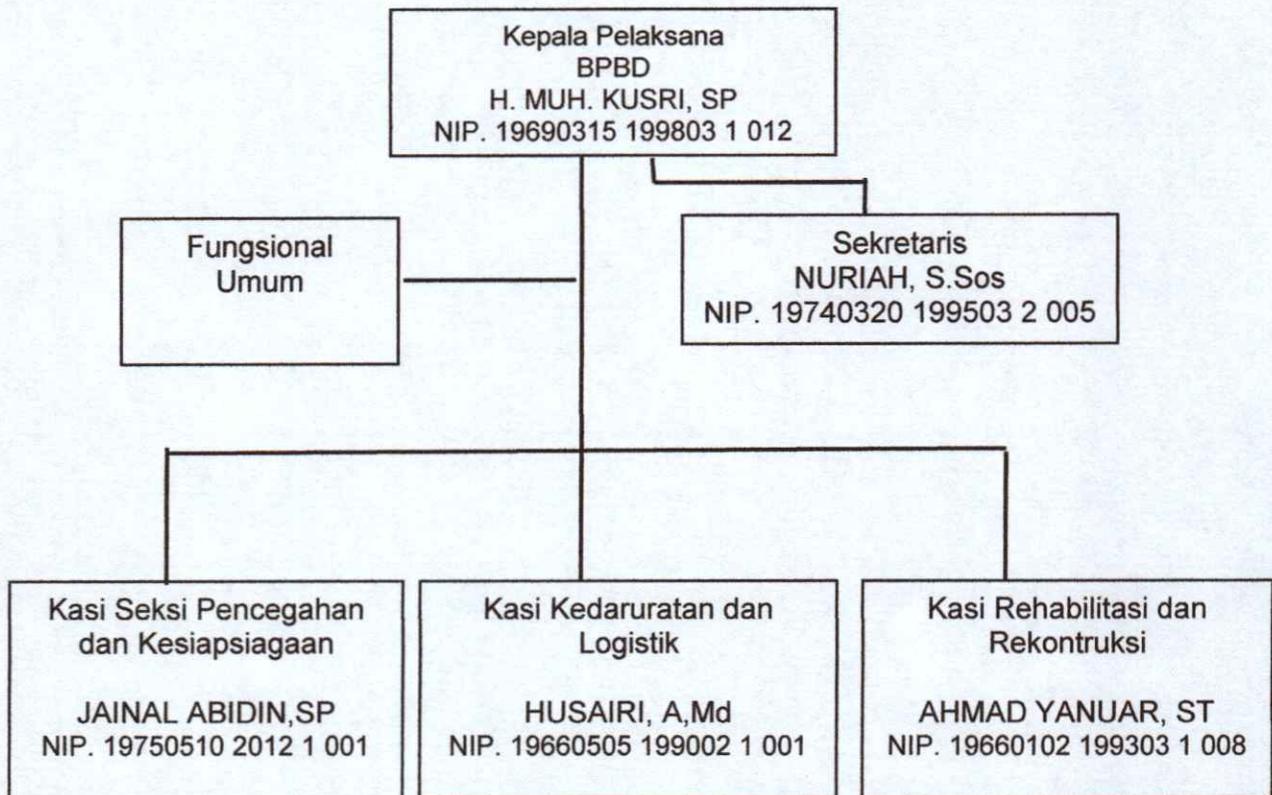
## **B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris Badan
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik
- e. Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lampiran IV Peraturan Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 10 Tahun 2013  
Tanggal : 20 Agustus 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



## **Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Tugas Pokok BPBD Kabupaten Tanah Laut yaitu :

### **URAIAN TUGAS POKOK**

**a. Kepala Pelaksana**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
- b) merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d) melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
- e) membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- f) membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretariat**, terdiri dari :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksa-

naan tugas satuan organisasi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

**c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu :**

Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;

- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugas Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### **d. Seksi Kedaruratan dan logistik**

Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. Pengkoordinasian operasional penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana. Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan penyediaan logistik Penanggulangan Bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- d. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- e. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- f. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengkoordinasian bantuan penanggulangan bencana; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

**e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi yaitu :**

Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi.

Rekontruksi mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengkoordinasikan rekontruksi. Rekontruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja rekontruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekontruksi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekontruksi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan

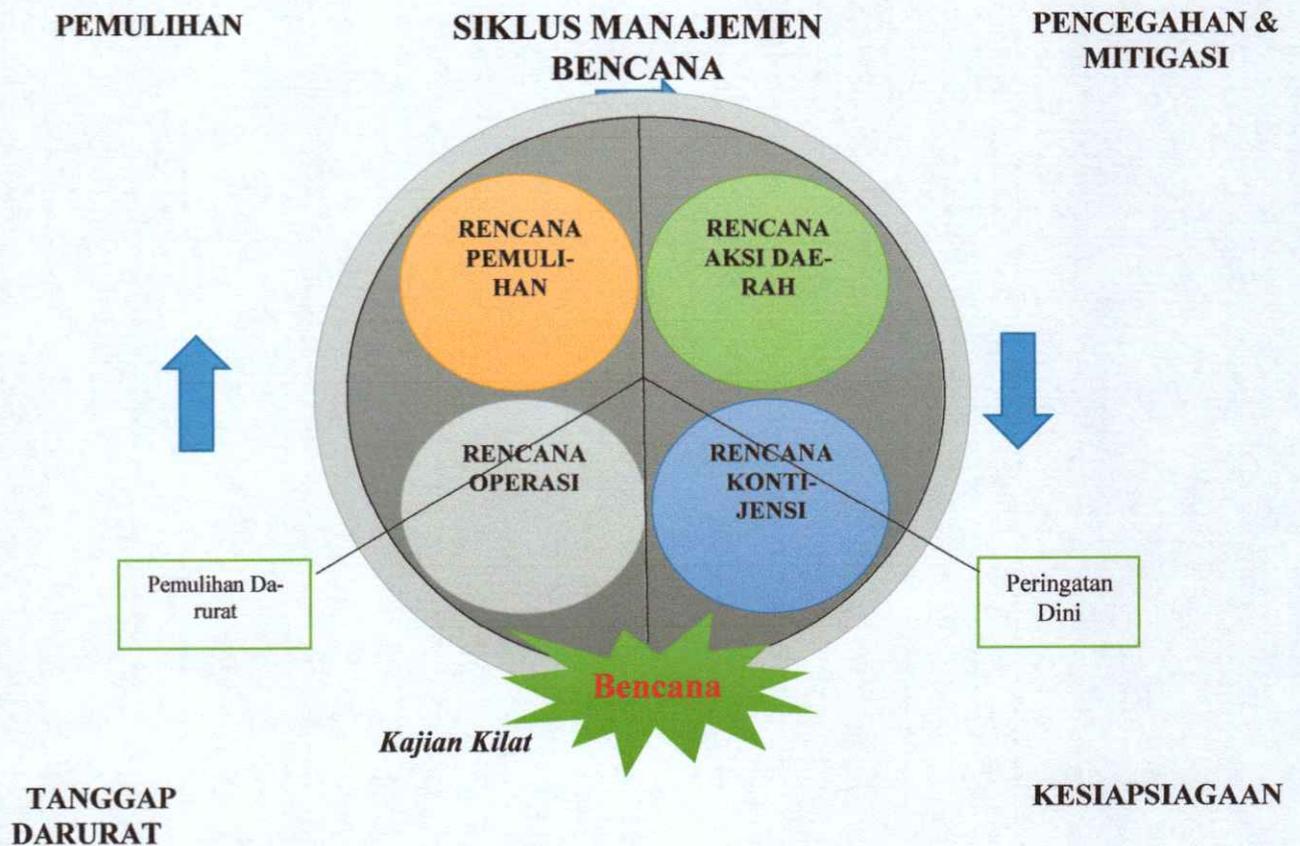
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekonstruksi.

### **C. PRODUK DAN LAYANAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

1. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan memberikan pelayanan menyelenggarakan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam menanggulangi bencana.
2. Bidang Kedaruratan Dan Logistik memberikan pelayanan menyelenggarakan Kedaruratan dan Logistik meliputi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana melalui penyaluran logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan pemasangan tenda untuk pengungsian.
3. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi memberikan pelayanan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketinggian yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut dimulai dari kegiatan perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:



Laporan Kejadian Bencana Yang Ditangani Oleh BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>JENIS BENCANA</b>	<b>JUMLAH KEJADIAN</b>
1.	<b>KEBAKARAN</b>	
	a. Rumah dan Toko	40 Kali
	b. Lahan / Hutan	596 Kali
	c. Dapur Harang	28 Kali
	d. Gudang Penyimpanan Harang	1 kali
	e. Kandang Ayam	2 Kali
	f. Peternakan Ayam	1 Kali
	g. Perkantoran	1 Kali
2.	<b>POHON TUMBANG</b>	6 Kali
3.	<b>PENEMUAN MAYAT</b>	3 Kali
4.	<b>ANGIN PUTING BELIUNG</b>	18 Kali
5.	<b>BANJIR</b>	2 Kali
6.	<b>PASANG AIR LAUT</b>	1 Kali
<b>TOTAL KEJADIAN</b>		<b>699 Kali</b>

**D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan

- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja 2019

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
  - 1. Target dan Capaian IKU
  - 2. Uraian dan analisa Capaian IKU
- B. Capaian Sasaran Strategis
  - 1. Capaian Strategis sesuai Renstra dan Target
  - 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
  - 3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019
    - Belanja Tidak langsung
    - Belanja Langsung (tabel)

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2018
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan Tahun 2019
- 6. Capaian Kinerja Renstra 2013 - 2018

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. VISI RPJMD

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu menyemangati.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Tanah Laut menetapkan visi ***“ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi, ”***.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju **“ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi ( Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi )**

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya *"Sense of responsibility and professionally"* dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

## **B. MISI RPJMD**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **"Tanah Laut yang BERINTERAKSI"**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Operasionalisasi tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, Ke 3 dan Ke 5 Yaitu :

Misi 2. "Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif "

Misi 3 " Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Misi 5 " Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penjabaran Misi 2 :

- Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.

Penjabaran Misi 3 :

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut

Penjabaran Misi 5 :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

### **C. TUJUAN**

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Tercapainya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
- b. Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
- c. Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi

### **D. SASARAN STRATEGIS**

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 5 (Lima) strategi yang didukung formalisasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

E. TABEL (TUJUAN, INDIKATOR, TARGET, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET 5 TAHUNAN)

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tercapainya kepedulian dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana	Persentase Penanggulangan bencana	100%	Meningkatnya pelatyan penanganan bencana terhadap masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2	Tercapainya partisipasi aparatatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, berupa Penye-	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	Meningkatnya partisipasi aparatatur dan masyarakat dalam penanganan bencana berupa penyediaan peralatan dan logis-	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	275 orang	120 orang	150 orang	200 orang	250 orang

diaan peralatan logistik dan penanganan Re-habilitasi Rekonstruksi pasca bencana										
tik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana										
Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi	120 orang	150 orang	160 orang	170 orang	180 orang					
Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	35 orang	25 orang	30 orang	35 orang	40 orang					
Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec								
Jumlah Laporan Data bencana yang di-update	3 Dokumen									
Jumlah Desa Tangguh bencana	3 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa					
Jumlah posko penanganan bencana di Kecamatan.	5 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec					
Bencana yang dilayani sesuai SOP	1 x 24 Jam									

					Jumlah Korban yang menerima logistik	250 Paket	300 Paket	300	350 Paket	350 Paket
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang di penuhi sesuai dengan Standar Operasional	27 Buah	19 buah	25 Buah	30 Buah	35 buah
					Jumlah Peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 buah	23 Buah	22 Buah	20 buah	18 Buah
					jumlah data / Kejadian Korban yang terdampak Bencana	12 Laporan				
					Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	180 orang	320 orang	320 orang	360 orang	360 orang
					jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana.	11 Kec				



					5 Dokumen				
				Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen				
				Jumlah Event yang diikuti	2 Pameran				
				Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen				
				Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan				
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan				

## F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikaor Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber data
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Hasil Survei	- Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan - Seksi Kedaruratan dan Logistik - Seksi rehabilitasi dan Rekonstruksi

## G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - m. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
    - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  3. Program peningkatan disiplin aparatur
    - a. Pengadaan pakaian kerja lapangan
  4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
    - a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
  5. Program kerjasama informasi dengan mas media
    - a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat
  6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
    - b. Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana
    - c. Peringatan Dini Bencana
    - d. Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan wilayah pasca bencana alam.
  7. Program Perlindungan masyarakat
    - a. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

#### **G. PERJANJIAN KINERJA 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KAB. TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	BAIK
2.	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	275 orang
		- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi.	275 orang
		- Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	35 Orang
		- Jumlah Titik Rawan Bencana	187 Kejadian
		- Jumlah Laporan Data Bencana yang diupdate	3 Dokumen
		- Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa
		- Jumlah Posko Penanggulangan Bencana di Kecamatan	5 Kec
		Bencana yang di layani sesuai SOP	1 x 24 jam
		Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik.	100 Paket
		Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	27 Buah
		Jumlah peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 Buah
		Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana	12 laporan
		- Jumlah Masyarakat/ kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	6 Kali
		- Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec

		- Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa/Kec
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah
		- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah
		- Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen
		- Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran
		- Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen
		- Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan
		- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	80.999.750,00
		- Pelatihan kewaspadaan dini bencana	52.199.700,00
		- Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	49.499.300,00
		- Peringatan Dini Bencana	49.498.900,00
2.	Program Perlindungan Masyarakat	- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	76.499.500,00
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	71.999.850,00

4.	Program kerjasama informasi dengan mas media	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	15.000.000,00
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	55.011.358,00 15.000.000,00 336.257.500,00 25.352.500,00 2.249.900,00 4.300.000,00 17.090.900,00 7.199.700,00 2.681.798,00 16.200.000,00 358.400.000,00 7.200.000,00 1.040.238.511,00
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00 24.290.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 2.332.169.167,00</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Hasil Survey masyarakat yang terdampak bencana	- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Seksi Kedaruratan dan Logistik - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Hasil Survey

**1. Target dan Capaian IKU**

Target Indikator kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang berhubungan dengan capaian kegiatan adalah sebagai berikut :

Target IKU BPBD

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik

## URAIAN ATAS CAPAIAN TARGET

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2019. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### Capaian IKU BPBD

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik	100%

## 2. Uraian dan analisa Capaian IKU

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81,23 dengan angka indeks sebesar 81,23 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **MEMUASKAN**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25. Dengan unsur penilaian sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	NRR Tertimbang per Unsur	Solusi Peningkatan IKM Tahun 2020
1	Persyaratan Pelayanan	3,093	0,340	Memberikan Informasi kejadian bencana yang cepat dan akurat ke BPBD Kab. Tanah Laut
2	Prosedur Pelayanan	3,293	0,362	Langsung berhubungan dengan petugas yang ada di Kecamatan dan Posko Induk BPBD
3	Kecepatan Pelayanan	3,180	0,349	Memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat agar lebih mendahulukan unit emergency pada saat terjadi bencana
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,893	0,428	Selalu memberikan pelayanan yang terbaik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum	3,160	0,347	Lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap masyarakat
6	Kemampuan petugas Pelayanan	3,193	0,351	Melakukan pembinaan dan pelatihan
7	Kesopanan dan Kerama-	3,226	0,354	Lebih sopan dan ramah lagi

	han Petugas			saat menerima panggilan atau menghadapi laporan untuk melakukan aksi penanggulangan bencana
8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,226	0,354	Lebih memaksimalkan kembali dalam pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana
9	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,313	0,364	Lebih memaksimalkan semua layanan pengaduan dari masyarakat
Nilai Indeks (NI)			3,249	
<b>Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25)</b>			<b>81,23</b>	<b>MEMUASKAN</b>

Maka untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,093 \times 0,11) + (3,293 \times 0,11) + (3,180 \times 0,11) + (3,893 \times 0,11) + (3,160 \times 0,11) + (3,193 \times 0,11) + (3,226 \times 0,11) + (3,226 \times 0,11) + (3,313 \times 0,11) = 3,249$$

maka nilai survei adalah 3, 249

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar  
=  $3,249 \times 25 = 81,225$  atau 81,23
- b. Mutu Pelayanan B
- c. Kinerja unit pelayanan Memuaskan

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

#### Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1	2	3	4
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK MEMUASKAN
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG MEMUASKAN
3	2,51 - 3, 25	62,51 - 81,25	B	MEMUASKAN
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT MEMUASKAN

Penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat IKM tahun 2019 pada Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa nilai paling rendah yaitu pada : KESESUAIAN PRODUK PELAYANAN ANTARA YANG TERCANTUM. Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Cimenyan pada unsur Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3.160 hal itu dikarenakan pada pelayanan Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum terdapat pelayanan bencana kebakaran yaitu kebakaran Pemukiman dan Kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk urusan kebakaran masuk ke SATPOL PP, sehingga terjadi tidaksesuaian produk pelayanan. Satpol PP menangani kebakaran pemukiman dan BPBD menangani Kebakaran Hutan dan Lahan.

Adapun Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN, Faktor Pendukung kenapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada unsur Biaya pelayanan tinggi yaitu dengan nilai 3,893 hal itu dikarenakan di BPBD dalam berbagai pelayanan sudah tidak dipungut biaya/gratis. Oleh sebab itu, maka unsur Biaya/Tarip mendapat nilai

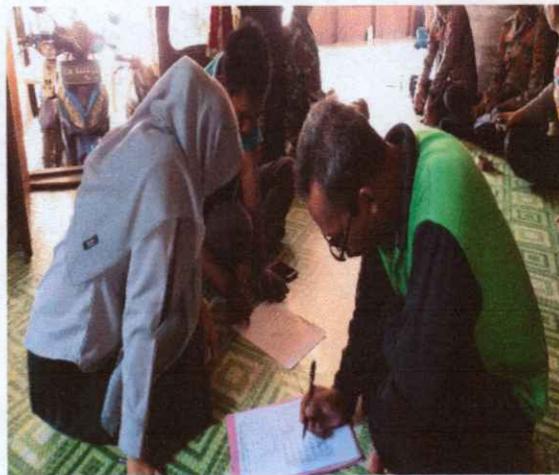
tinggi. Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Biaya/Tarif adalah tetap memberikan Suport dan pembinaan kepada karyawan untuk tetap berkomitem memberikan pelayanan yang Prima.

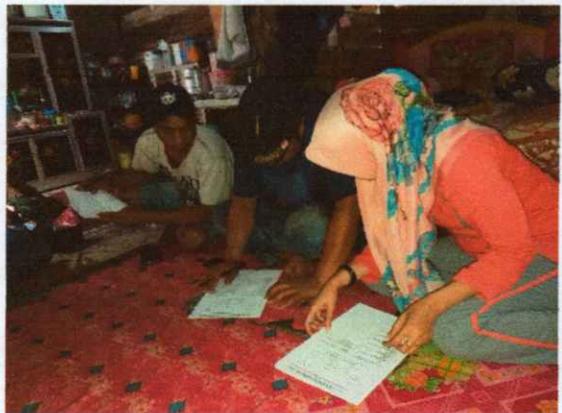
Pada Tahun 2019 BPBD kabupaten Tanah Laut dalam pengukuran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 81,23%.

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan pada tahun 2019 yang diperoleh dengan predikat B (Memuaskan) maka untuk tahun 2020 yang akan datang bisa mencapai predikat A (sangat memuaskan) dengan pelayanan yang BPBD berikan yaitu :

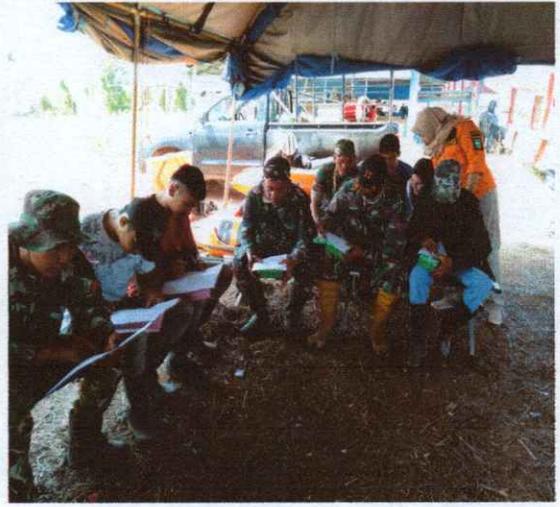
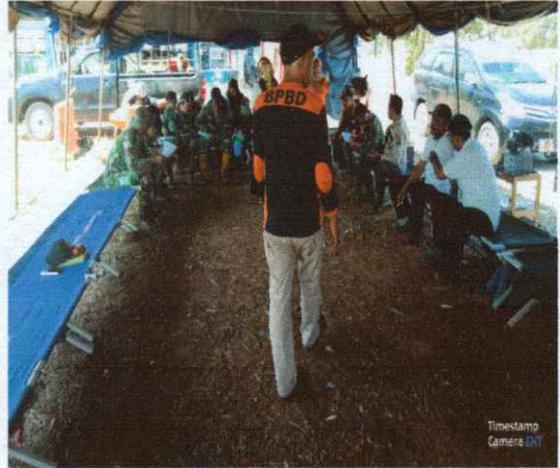
- Dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap bencana yang datang dan merespon lebih cepat yaitu waktu minimal untuk menanggulangi bencana (1 x 24 ) Kejadian.
- Mendistribusikan secepat mungkin logistik dari stokeholder terkait kepada masyarakat yang terdampak bencana.

- FOTO MENGISI KUESIONER IKM TAHUN 2019









## B. Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur.

### 1. Capaian Sasaran Startegis sesuai Renstra dan Target

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 3 strategi yang didukung formalisasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Strategi yang sesuai Renstra tersebut adalah:

**TABEL.**  
**SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA DAN TARGET**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	KET-ERANGAN TARGET
			2019	
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	BAIK	Eselon III Kepala Pelaksana BPBD
2	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan dan logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	275 orang	Eselon IV Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi	275 orang	
		Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti	35 orang	

		pelatihan dan bersertifikat	
		Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kec
		Jumlah Laporan Data bencana yang diupdate	3 Dokumen
		Jumlah Desa Tangguh bencana	3 Desa
		Jumlah posko penanggulangan bencana di Kecamatan.	5 Kec
		Bencana yang dilayani sesuai SOP	1 x 24 Jam
		Jumlah Korban bencana yang menerima logistik	250 Paket
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang di penuhi sesuai dengan Standar Operasional	27 Buah
		Jumlah Peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 buah
		jumlah data / Kejadian Korban yang terdampak Bencana	12 Laporan
		Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	180 orang
		jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana.	11 Kec
		Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec
			Eselon IV Kasi Kedaruratan dan Logistik
			Eselon IV Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3	Meingkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	Eselon IV Sekretaris BPBD
		Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah	
		Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah	
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	
		Jumlah Event yang di ikuti	2 Pameran	
		Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan	
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan	

## 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Tabel Realisasi Capaian sasaran Strategis Eselon III dan Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik	Baik	100	IKU eselon III

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	
<b>Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					
Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.	1.	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	275 orang	360 orang	130%
	2	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi.	275 orang	455 orang	165%
	3	Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	35 orang	0	0 %
	4	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec	100 %
	5	Jumlah Laporan Data Bencana yang diupdate	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	6	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	3 Desa	100 %
	7	Jumlah Posko Penanggulangan Bencana di Kecamatan	5 Kec	0	0%
<b>Kasi Kedaruratan dan Logistik</b>					
8	Bencana yang di layani sesuai SOP	1 x 24 Jam	1 x 24 Jam	100%	
9	Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik.	250 Paket	845 Paket	338%	
10	Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	27 buah	52 buah	192%	
11	Jumlah peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 buah	24 buah	96%	
12	Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana	12 laporan	12 Laporan	100%	
<b>Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>					
13	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	180 orang	180 Orang	100%	

	14	Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%
	15	Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa /Kec	4 Desa /Kec	100 %

**Penjelasan Tabel dari Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :**

1. Target yang ditetapkan berdasarkan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi berjumlah 275 orang sedangkan realisasinya 360 orang yaitu :
  - a) Sosialisasi Peringatan Dini Bencana di laksanakan di 9 Kecamatan yang masing-masing kecamatan pesertanya berjumlah 40 orang.
2. Target yang ditetapkan berdasarkan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi berjumlah 275 orang sedangkan realisasinya 455 orang yaitu :
  - a) Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana di laksanakan di 5 Kecamatan yang masing-masing kecamatan pesertanya berjumlah 55 orang
  - b) Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan wilayah pasca bencana alam di laksanakan di 4 kecamatan yang masing-masing kecamatan pesertanya berjumlah 45 orang
3. Jumlah tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat tahun 2018 sebanyak 2 personil PNS sedangkan tahun 2019 tidak ada yang mengikuti pelatihan di karenakan uang kontribusi tidak dianggarkan.
4. Jumlah daerah rawan bencana yang tertanggulangi adalah meliputi seluruh kecamatan yaitu 11 Kecamatan ini dilihat dari Kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2019 yaitu : Kecamatan Pelaihari terjadi 83 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 84 Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 65 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 25 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 176 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 8 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 17 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 109 bencana, Keca-

matan Kintap terjadi 71 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 43 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 18 Bencana.

5. Jumlah laporan data bencana yang di update pada tahun 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 3 dokumen adalah Rencana kontijensi bencana banjir di Desa Panyipatan Kecamatan Pelaihari, Desa Tangguh Bencana di Desa Penjaratan Kecamatan Pelaihari, Desa Sei Bakar di Kecamatan Bajuin, Desa Kali Besar di Kecamatan Kurau dan Desa Gunung raja di Kecamatan Tambang Ulang, dan Sekolah laut di Kecamatan Kintap.
6. Jumlah Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 dan ada 3 desa yaitu di Desa penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang.
7. Jumlah posko siaga bencana pada tahun 2017 ada 3 buah posko di Kecamatan Bati-Bati, Kec. Kintap dan Kec. Takisung sedangkan pada tahun 2018 ada penambahan 2 posko di Kec. Kurau dan Kec. Jorong sehingga realisasi sampai dengan tahun 2018 sudah ada 5 posko kecamatan tahun 2019 tidak pembangunan Posko kecamatan.

**Penjelasan Tabel dari Kasi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :**

8. Jumlah waktu pelayanan penanggulangan bencana 1 x 24 jam dengan menggunakan system piket untuk semua anggota BPBD baik itu yang ada di Posko Induk Pelaihari maupun Posko yang ada di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Takisung, Kurau, Bati-Bati, Jorong dan Kintap sehingga apabila terjadi bencana di 5 Kecamatan tersebut dapat ditanggulangi kurang dari 1 x 24 jam.
9. Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik untuk bantuan korban bencana pada tahun 2018 yang tersalurkan sebanyak 150 paket dan pada tahun 2019 adalah sebanyak 845 paket dengan target 250 paket berdasarkan stok yang tersedia dan tercapai 338%.ini berdasarkan kejadian yang di tangani oleh BPBD sebanyak 699 kali kejadian bencana.

10. Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional kebencanaan adalah 27 buah dengan realisasi 52 buah sesuai dengan SOP yang dibeli baik melalui Dana APBD Kabupaten Tanah Laut maupun bantuan dari APBN.
11. Jumlah Peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan lagi adalah jumlah peralatan keseluruhan 44 buah dan terdapat berupa Besi Tenda, perahu yang bocor, dan alat pemadam yang rusak sebanyak 20 buah, yang bias digunakan dan di fungsikan 24 buah dari target 25 buah.
12. Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana adalah 12 laporan atau setiap bulan data kejadian berjumlah 1 laporan yang langsung dibuat oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana (Pusdalops) PB BPBD Kabupaten Tanah Laut dan di laporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan seterusnya di lanjutkan ke BNPB Republik Indonesia.

**Penjelasan Tabel dari Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah sebagai berikut :**

13. Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat pasca bencana yang di fasilitasi melalui Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam tahun 2019 adalah sebanyak 180 orang meliputi 4 Kecamatan yaitu Jorong, Bumi Makmur, Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Kintap.
14. Jumlah lokasi yang terkena dampak pasca bencana dalam 1 tahun 2019 di lakukan setiap bulan yaitu 11 Kecamatan yaitu : Kecamatan Pelaihari terjadi 83 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 84 Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 65 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 25 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 176 bencana, Kecamatan Batu Ampar terjadi 8 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 17 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 109 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 71 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 43 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 18 Bencana.
15. Jumlah Desa/Kecamatan yang di rehabilitasi melalui rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana di lakukan di 4 Desa yaitu di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Desa

Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur, Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati dan Desa Muara kintap Kecamatan kintap.

Realisasi di Bidang Administrasi Perkantoran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100 %	100%	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah	6 buah	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah	19 buah	100
	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 dokumen	100
	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	2 Pameran	100
	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan	5 Laporan	100
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100

Penjelasan Realisasi Bidang kesekretariatan adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Bidang Kepegawaian	1. Naik Pangkat	8 Orang	1. H.Muh.Kusri,SP 2. Nuriah, S.Sos 3. Edy Siswoyo, A.Md 4. Teguh Heriadi 5. Abdullah Haidi 6. Wahyuni 7. Suaibatul Ahmad 8. Muhammad Alfiannoor

		2. Naik berkala	8 Orang	1.H. Muh. Kusri, SP 2. Zainal Abidin,SP 3.Husairi, A.Md 4. Edy Siswoyo, A.Md 5. Abdullah Haidi 6. Bakhram 7. Suibatul Akhmad 8. Muhammad Jain
		3.Cuti	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. SK Perpanjangan Kontrak PTT	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Event yang diikuti	2 Pemeran	1 Pameran Anggrek dan 1 Pameran pembangunan
2	Bidang Keuangan dan perencanaan	1. Calk	1 laporan	1 laporan
		2. Lakip	1 Laporan	1 Laporan
		3. LPPD dan LKPJ	1 Laporan	1 Laporan
		4. Renstra	1 Laporan	1 Laporan
		5. Renja murni dan Perubahan	2 Laporan	2 Laporan
3	Bidang Umum dan Perlengkapan	1. sensus Barang	1 Laporan	1 Laporan

### 1. Uraian dan Analisa Capaian sasaran Strategis :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat** capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui program yang berhubungan dengan pelaksanaan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 23.679.600,00 terealisasi sebesar Rp. 21.856.500,00 atau 92,30% dengan Kegiatan diantaranya :
  - a) Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 17.090.900,00 terealisasi sebesar Rp. 16.479.900,00 atau 96,42%.
  - b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.199.700,00 terealisasi sebesar Rp. 5.376.600,00 atau 74,68%.

Indikator sasaran telah terealisasi sudah hampir baik yaitu (90%). Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator sasaran, yaitu: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat yang terdampak bencana dalam memperoleh pelayanan dari aparatur BPBD sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan serta untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

**Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, Logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.**

capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp. 238.997.650,00 terealisasi sebesar Rp. 209.838.700,00 atau 87,80% dengan Kegiatan :
  - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 87.799.750,00 terealisasi sebesar 79.747.900 atau 90,83%.
  - b) Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 52.199.700,00 terealisasi sebesar Rp. 50.322.800,00 atau 96,40%
  - c) Peringatan Dini Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 49.498.900,00 terealisasi sebesar Rp. 40.135.000,00 atau 81,08 %
  - d) Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan wilayah pasca bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 49.499.300,00 terealisasi sebesar Rp. 39.633.000,00 atau 80.07%
2. Program Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 76.499.500,00 terealisasi sebesar Rp. 74.345,500 atau 97,18% dengan Kegiatan :
  - a) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 76.499.500,00 terealisasi sebesar Rp. 74.345,500 atau 97,18%.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 115.349.850,00 terealisasi sebesar Rp. 109.656.000,00 atau 95,06% dengan Kegiatan :
  - a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan anggaran sebesar Rp. 115.349.850,00 terealisasi sebesar Rp. 109.656.000,00 atau 95,06%.

Indikator sasaran masih belum terealisasi maksimal yaitu (93%). Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran 2, yaitu:

- Meningkatnya kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana melalui Pelatihan, sosialisasi dan simulasi agar masyarakat atau kelompok peduli bencana(relawan) yang indeks resiko bencana tinggi di daerahnya bisa menggulangi bencana terlebih dahulu sebelum petugas kebencanaan/TRC datang dan Kesiapsiagaan juga untuk melakukan pemantauan dan mendeteksi informasi dari BMKG tentang Peringatan dini terhadap suatu bencana kepada masyarakat dan peningkatan aparatur di kabupaten maupun di kecamatan dalam penanggulangan bencana.
- Meningkatkan status darurat bencana maksimal 14 hari setelah bencana terjadi dengan memberikan dukungan stocklogistik yang tersedia berupa sandang dan pangan yang akan didistribusikan kepada korban yang terdampak bencana
- Meningkatkan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat bencana alam melalui rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari BPBD Kabupaten, TNI, Polri, Relawan, Masyarakat dan BPBD di Kecamatan sehingga dapat menanggulangi bencana pada masa tanggap darurat dengan efektif dan efisien.
- Memfasilitasi masyarakat/kelompok masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban pasca bencana melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya.

**Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi organisasi** capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.075.283.309,00 terealisasi sebesar Rp. 1.907.809.471,00 atau 91,93% dengan Kegiatan :
  - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.323.849,00 atau 65,24%.

- b) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 28.970.000,00 atau 96,57%
  - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 367.220.000,00 terealisasi sebesar Rp. 313.801.474,00 atau 85,45%.
  - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 25.352.500,00 terealisasi sebesar Rp. 4.467,100.00 atau 17,62%
  - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.249.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.239.000,00 atau 99,52%
  - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan anggaran sebesar Rp. 33.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.130.000,00 atau 51,67%
  - g) Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 17.090.900,00 terealisasi sebesar Rp. 16.479.900,00 atau 96,42%
  - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.199.700,00 terealisasi sebesar Rp. 5.376.600,00 atau 74,68%
  - i) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.681.798,00 terealisasi sebesar Rp. 2.064.000,00 atau 76,96%
  - j) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,00 atau 100%
  - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp. 28.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 28.285.000,00 atau 99,95%.
  - l) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 358.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 358.400.000,00 atau 100%
  - m) Jasa penunjang kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.116.438.511,00 terealisasi sebesar Rp. 1.068.072.548,00 atau 95,67%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 24.290.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.700.000,00 atau 97,57% dengan kegiatan :
    - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.290.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.700.000,00 atau 97,57%
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 55.335.000,00 terealisasi sebesar Rp. 54.560.000,00 atau 98,60% dengan kegiatan :
    - b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 55.335.000,00 terealisasi sebesar Rp. 54.560.000,00 atau 98,60%
  4. Program kerjasama informasi dengan mas media dengan anggaran sebesar Rp. 17.413.858,00 terealisasi sebesar Rp. 16.277.700,00 atau 93,48% dengan kegiatan :

- a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 17.413.858,00 terealisasi sebesar Rp. 16.277.700,00 atau 93,48%

Indikator sasaran telah terealisasi semua (95,%). Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, Umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

### Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Startegis Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan sasaran beserta indikator sasaran sesuai tabel sebagaimana di atas, maka dalam rangka membandingkan capaian sasaran antara tahun 2018 dengan 2019, sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik	Baik
Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.	1.	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	275 orang	360 orang
	2	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi.	275 orang	455 orang
	3	Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	0	0
	4	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec
	5	Jumlah Laporan Data Bencana	3	3 Doku-

	yang diapdate	Dokumen	men
6	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	1 Desa
7	Jumlah Posko Penanggulangan Bencana di Kecamatan	5 Kec	0 Kec
8	Bencana yang di layani sesuai SOP	1 x 24 Jam	1 x 24 Jam
9	Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik.	250 Paket	845 Paket
10	Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	0	52 buah
11	Jumlah peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	0	24 buah
12	Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana	12 laporan	12 Laporan
13	Jumlah Masyarakat/ kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	180 orang	180 Orang
14	Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec
15	Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa /Kec	4 Desa / Kec

### C. Akuntabilitas Keuangan.

#### 1. Ringkasan Realisasi APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 4.611.246.833,00** yang terdiri dari :

- **BELANJA LANGSUNG**

Jumlah belanja langsung untuk tahun anggaran 2019 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp.2.603.169.167,00** jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 7 (tujuh) program yang terdiri atas 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut  
Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Peningkatan
1	PENDAPATAN	0	0	0
2	BELANJA	<b>3.010.178.572</b>	<b>3.849.364.434</b>	127.88
	Belanja Pegawai	1.097.148.009	1.453.177.063	132.45
	Belanja Barang	1.913.030.563	2.325.177.371	121.54
	Belanja Hibah	0	0	0
3	BELANJA MODAL	<b>426.765.500</b>	<b>71.010.000</b>	16.64
	Belanja Peralatan dan Mesin	9.235.500	71.010.000	768.88
	Belanja Bangunan dan Gedung	381.871.000	0	0.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.984.000	0	0.00
	Belanja Modal Aset lainnya	11.675.000	0	0.00
	Surplus/Defisit	3.436.944.072	3.849.364.434	112.00

1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 berdasarkan Program.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2019 dengan anggaran sebesar **Rp. 2.603.169.167,00** Dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program yang terdiri atas 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan. Dan dari 22 (Dua Puluh Dua) dari kegiatan semua sudah terealisasi semua dengan baik, Realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
<b>SEKRETARIAT</b>			
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.075.283.309,00</b>	<b>1.907.809.471,00</b>	<b>91,93</b>
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.000.000,00	46.323.849,00	65,24
- Penyediaan peralatan dan	30.000.000,00	28.970.000,00	96,57

perlengkapan kantor			
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	367.220.000,00	313.801.474,00	85,45
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.352.500,00	4.467.100,00	17,62
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.249.900,00	2.239.000,00	99,52
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.150.000,00	17.130.000,00	51,67
- Penyediaan alat tulis kantor	17.090.900,00	16.479.900,00	96,42
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.199.700,00	5.376.600,00	74,68
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.681.798,00	2.064.000,00	76,96
- Penyediaan makana dan minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	100
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	358.400.000,00	358.400.000,00	100
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	28.300.000,00	28.285.000,00	99,95
i. Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD	1.116.438.511,00	1.068.072.548,00	95,67
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>55.335.000,00</b>	<b>54.560.000,00</b>	<b>98,60</b>
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	55.335.000,00	54.560.000,00	98,60
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>115.349.850,00</b>	<b>109.656.000,00</b>	<b>95,06</b>
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	115.349.850,00	109.656.000,00	95,06
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>238.997.650,00</b>	<b>209.838.700,00</b>	<b>87,80</b>
- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	87.799.750,00	79.747.900,00	90,83
- Pelatihan Kewaspadaan Dini bencana	52.199.700,00	50.322.800,00	96,40
- Peringatan Dini bencana	49.498.900,00	40.135.000,00	81,08
- Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca	49.499.300,00	39.633.000,00	80,07

bencana alam			
<b>Perlindungan Masyarakat</b>	<b>76.499.500,00</b>	<b>74.345.500,00</b>	<b>97,18</b>
- Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	76.499.500,00	74.345.500,00	97,18
<b>Kerjasama Informasi Dengan Mas Media</b>	<b>17.413.858,00</b>	<b>16.277.700,00</b>	<b>93,48</b>
- Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	17.413.858,00	16.277.700,00	93,48
<b>Jumlah</b>	<b>2.603.169.167,00</b>	<b>2.396.187.371,00</b>	<b>92,05</b>

• **BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp. 2.008.007.666,00**

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Gaji dan tunjangan	1.109.578.792,-	766.806.976,-	69,10%
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	898.498.874,-	686.370.087,-	76.39%

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran dalam tahun 2019 telah mencapai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan belum bisa dicapai secara maksimal. Bila dibanding dengan tahun 2018 dengan jumlah pencapaian sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 ada yang mengalami kenaikan, hal ini dengan adanya capaian nilai rata –rata semua unsur pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 81,23%. Dengan nilai B (memuaskan) menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada umumnya sudah baik dan merasa sangat puas dengan pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang terkena dampak langsung bencana baik karena faktor alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- Sasaran 2 juga mengalami kenaikan sehubungan dengan kejadian bencana yang di tangani oleh BPBD Tahun 2018 sebanyak 249 Kali kejadian, sedangkan Tahun 2019 yang ditangani sebanyak 699 kali kejadian lebih banyak dari tahun 2018, sasaran ini dilihat dari meningkatnya kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana melalui Pelatihan, sosialisasi

dan simulasi agar masyarakat atau kelompok peduli bencana (relawan) yang indeks resiko bencana tinggi di daerahnya bisa mengulangi bencana terlebih dahulu sebelum petugas kebencanaan/TRC datang dan Kesiapsiagaan juga untuk melakukan pemantauan dan mendeteksi informasi dari BMKG tentang Peringatan dini terhadap suatu bencana kepada masyarakat dan peningkatan aparatur di kabupaten maupun di kecamatan dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan status darurat bencana maksimal 14 hari setelah bencana terjadi dengan memberikan dukungan stocklogistik yang tersedia berupa sandang dan pangan yang akan didistribusikan kepada korban yang terdampak bencana serta terfasilitasinya masyarakat/kelompok masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban pasca bencana melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya.

- Sasaran 3 juga mengalami kenaikan di karenakan pelayanan di bidang administrasi perkantoran sebagai penunjang untuk meningkatkan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui indikator penilaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai tahun 2019 masih banyak kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya untuk peningkatan kinerja Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2019, adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sulit untuk dipadamkan apabila kebakaran hutan tersebut tidak bisa dijangkau oleh armada masuk

- c) Penyaluran logistik untuk kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak bencana sedikit terlambat di karenakan tidak dianggarkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tapi harus minta melalui surat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai.

**Solusi**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengamanan personil).
- b) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water bombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut masih melakukan pendekatan dengan pihak TAPD untuk pengadaan Logistik bisa dianggarkan di APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- d) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2019, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2020  
**Kepala Pelaksana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut**



# L A M P I R A N

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebencanaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

**TUGAS :**

Perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**FUNGSI :**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kebencanaan, baik pra bencana, tanggap darurat bencana, paska bencana, serta penanganan pengungsi secara cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan  
Pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis  
Pengelolaan urusan kesekretariatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Makna alasan memilih IKU dan rumus penghitungan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat ( IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	<p><b>Makna Indikator</b> SKM ini yang paling sering digunakan karena dilakukan melalui survey masyarakat. SKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p><b>Alasan pemilihan Indikator</b> Bencana menganalisis risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu bahaya berdasarkan analisa bahaya, Kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana kepada masyarakat melalui simulasi dan pelatihan dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut.</p> <p><b>Rumus perhitungan</b> Hasil Survey Masyarakat</p>	<p>Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan</p> <p>Seksi Kedaruratan dan Logistik</p> <p>Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	Hasil Survey





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Nomor : 700/186 / LHE – Insp/ 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem  
AKIP) Tahun 2018.

Pelaihari, 15 Juli 2019

Kepada Yth.

Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Laut

di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP 135/M/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/250 / Insp/ 2019 tanggal 10 Juni 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar **64.45** dengan kategori **B, Baik**, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 17.95 dari yang diharapkan sebesar 30 atau dengan angka tertimbang sebesar 59.82 % masuk kategori **CC, Cukup (Memadai)**, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

b. *Pengukuran Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 15.63 dari yang diharapkan sebesar 25% atau dengan angka tertimbang sebesar 62.50 % berkategori **B, Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

c. *Pelaporan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 10.42 dari yang diharapkan sebesar 15 atau dengan angka tertimbang sebesar 69.46 % berkategori **B, Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

d. *Evaluasi Internal*

Diperoleh nilai sebesar 6.92 dari yang diharapkan sebesar 10 atau dengan angka tertimbang sebesar 69.22% berkategori berkategori **B, Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

e. *Pencapaian Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 13.54 dari yang diharapkan sebesar 20% atau dengan angka tertimbang sebesar 67.69% berkategori **B, Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajarannya, agar dilakukan perbaikan yaitu terhadap Dokumen Perencanaan yang ada, agar dilakukan reuiu secara berkala.

**Perencanaan Kinerja :**

Perlu dilakukan reuiu secara berkala terhadap Dokumen perencanaan yang ada, dan relevan dengan kondisi saat ini, antara lain :

- Perbaikan tujuan yang dituangkan dalam Renstra tidak berorientasi hasil, dan masih berorientasi output.
- Perbaikan sasaran yang disajikan dalam Renstra dan Lapkin tidak berorientasi hasil, dan masih merupakan proses.

- Perbaiki satuan target yang ditetapkan karena tidak jelas.
- Perbaiki indikator sasaran yang dituangkan dalam Renstra dan Lapkin tidak selaras dengan yang dituangkan dalam PK
- Perbaiki indikator sasaran yang dituangkan dalam PK tidak selaras dengan yang dituangkan dalam Pohon kinerja

**Pengukuran Kinerja :**

- Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*

**Pelaporan Kinerja :**

- Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja ;
- Untuk menjamin keandalan data kinerja, perlu ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan dan analisis data kinerja.

**Evaluasi Internal**

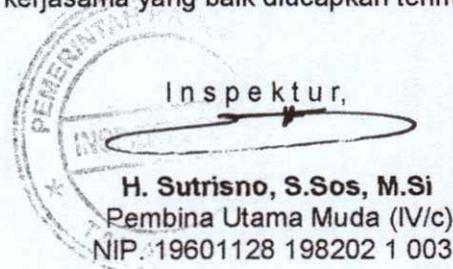
- Pemantauan rencana aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap rencana aksi dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.
- Perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap rencana aksi dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata sehingga diketahui kendala dalam pencapaian target kinerja

**Pencapaian Kinerja :**

- Informasi yang disajikan agar digunakan dalam pelaksanaan dalam perbaikan perencanaan;
- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Perlunya ditingkatkan pencapaian target kinerja sehingga nilai hasil evaluasi dapat mengalami kenaikan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan beberapa saran tersebut di atas untuk ditindak lanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur,



**H. Sutrisno, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601128 198202 1 003

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari sebagai laporan.
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta.

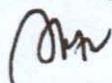
KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30.00</b>	<b>59.82%</b>	<b>17.95</b>
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>23.47%</b>	<b>2.35</b>
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		<b>2.00</b>	<b>86.11%</b>	<b>1.72</b>
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		B	0.75
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0.75
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		B	0.75
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0.75
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0.75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.63</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		E	-
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		E	-
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		E	-
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		E	-
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		D	0.25
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		E	-
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		E	-
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		E	-
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya <i>sampai dengan tahun berjalan</i>		E	-
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		E	-
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>78.00%</b>	<b>15.60</b>
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.00</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>8.00</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0.75
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		D	0.25
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0.75
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00
<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>		<b>6.00</b>	<b>60.00%</b>	<b>3.60</b>

15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25.00</b>	<b>62.50%</b>	<b>15.63</b>
<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>81.25%</b>	<b>4.06</b>
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0.75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0.50
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		<b>12.50</b>	<b>62.50%</b>	<b>7.81</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0.50
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7.50</b>	<b>50.00%</b>	<b>3.75</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0.50
19	IKU telah direviu secara berkala		C	0.50
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15.00</b>	<b>69.46%</b>	<b>10.42</b>
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>93.75%</b>	<b>2.81</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0.75
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7.50</b>	<b>65.43%</b>	<b>4.91</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0.75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperianikan		B	0.75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50

III.	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	4.50	60.00%	2.70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50
	<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	10.00	69.22%	6.92
I.	<b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	2.00	89.00%	1.78
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0.67
	<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>	5.00	65.33%	3.27
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0.75
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0.50
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67
	<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	3.00	62.50%	1.88
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan <u>program di masa yang akan datang</u>		B	0.75
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50
	<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>	20.00	67.69%	13.54
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>	7.50	66.67%	5.00
1	Target dapat dicapai		B	2.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>	12.50	170.75%	8.54
4	Target dapat dicapai			0.83
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2.40
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			2.19
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3.13
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	100.00	64.45%	64.45

Mengetahui  
Wakil Penanggung Jawab



Ir. Hj. Nurhidayati, MM  
NIP. 19680128 199302 2 002

Pelaihari, 15 Juli 2019  
Ketua Tim



Hj. Rusmiati, MM  
NIP. 19651028 198602 2 005



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)( 21300) Pelaihari Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUKAMTA**  
Jabatan : **BUPATI TANAH LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. MUH. KUSRI, SP**  
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

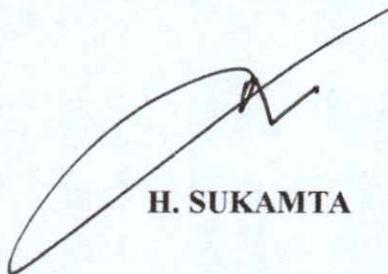
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**BUPATI TANAH LAUT**



**H. SUKAMTA**

Pelaihari, 29 Maret 2019  
**KEPALA PELAKSANA  
BPBD KAB. TANAH LAUT**



**H. MUH. KUSRI, SP**  
Nip. 19690315 199803 1 012

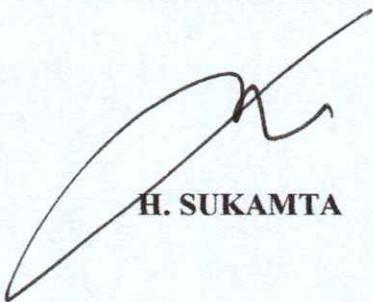
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KAB. TANAH LAUT**

No.	Sasaran strategi sesuai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik

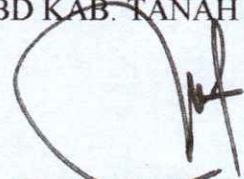
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pelatihan kewaspadaan dini bencana Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam Peringatan Dini Bencana	80.999.750,00  52.199.700,00 49.499.300,00 49.498.900,00
2.	Program Perlindungan Masyarakat	- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	76.499.500,00
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	71.999.850,00
4.	Program kerjasama informasi dengan mas media	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	15.000.000,00
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	55.011.358,00 15.000.000,00 336.257.500,00 25.352.500,00 2.249.900,00 4.300.000,00

6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.090.900,00
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.199.700,00
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.681.798,00
		- Penyediaan makanan dan minuman	16.200.000,00
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	358.400.000,00
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	7.200.000,00
		- Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	1.040.238.511,00
		- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.290.000,00

Pihak Kedua  
BUPATI TANAH LAUT

  
H. SUKAMTA

Pelaihari, 29 Maret 2019  
Pihak Pertama  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KAB. TANAH LAUT

  
H. MUH. KUSRI, SP  
Nip. 19690315 199803 1 012



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)( 21300) Pelaihari Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuriah, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Muh. Kusri, SP  
Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala pelaksana

**H. MUH. KUSRI, SP**

**Nip. 19690315 199803 1 012**

Pelaihari, 02 Januari 2019

Sekretaris

**NURIAH, S.Sos**

**Nip. 19740320 199503 2 005**

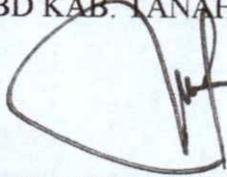
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KAB. TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Organisasi	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah
		- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah
		- Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen
		- Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran
		- Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen
		- Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan
		- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.011.358,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
		- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	336.257.500,00
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.352.500,00
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.249.900,00
		- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.300.000,00
		- Penyediaan alat tulis kantor	17.090.900,00
		- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	7.199.700,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Minum</li> <li>- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</li> <li>- Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD</li> </ul>	<p>2.681.798,00</p> <p>16.200.000,00</p> <p>358.400.000,00</p> <p>7.200.000,00</p> <p>1.040.238.511,00</p>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>- Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional</li> </ul>	<p>24.290.000,00</p> <p>25.000.000,00</p>
Program kerjasama informasi dengan mas media	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</li> </ul>	<p>15.000.000,00</p>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.951.472.167,00</b>

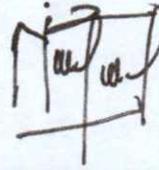
Pihak Pertama  
**KEPALA PELAKSANA**  
**BPBD KAB. TANAH LAUT**



**H. MUH. KUSRI, SP**  
**Nip. 19690315 199803 1 012**

Pelaihari, 02 Januari 2019

Pihak Kedua  
**Sekretaris**



**NURIAH, S.Sos**  
**Nip. 19740320 199503 2 005**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)( 21300) Pelaihari Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jainal Abidin, SP  
Jabatan : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Muh. Kusri, SP  
Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Pelaksana

**H. MUH. KUSRI, SP**  
Nip. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 27 Mei 2019  
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

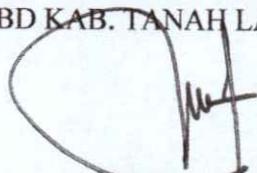
**JAINAL ABIDIN, SP**  
Nip. 19750510 201212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KAB. TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1..	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistic dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	-	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	275 orang
		-	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi.	275 orang
		-	Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	35 Orang
		-	Jumlah Titik Rawan Bencana	187 Kejadian
		-	Jumlah Laporan Data Bencana yang diapdate	3 Dokumen
		-	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa
		-	Jumlah Posko Penanggulangan Bencana di Kecamatan	5 Kec

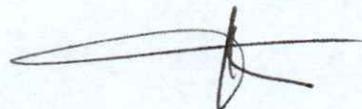
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Perlindungan Masyarakat	- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	76.499.500,00
2.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Pelatihan kewaspadaan dini bencana	52.199.700,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 128.699.200,00</b>

Pihak Pertama  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KAB. TANAH LAUT



**H. MUH. KUSRI, SP**  
Nip. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 27 Mei 2019  
Pihak Kedua  
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan



**JAINAL ABIDIN, SP**  
Nip. 19750510 201212 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)( 21300) Pelaihari Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husairi, A.Md  
Jabatan : Kasi Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Muh. Kusri, SP  
Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala pelaksana

**H. MUH. KUSRI, SP**  
Nip. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 5 April 2019  
Kasi Kedaruratan dan Logistik

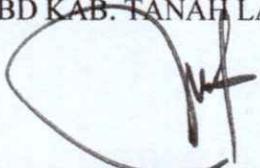
**HUSAIRI, A.Md**  
Nip. 19660505 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KAB. TANAH LAUT**

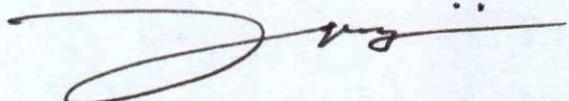
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistic dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Bencana yang di layani sesuai SOP	1 x 24 jam
		- Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik.	250 Paket
		- Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	27 Buah
		- Jumlah peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 Buah
		- Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana	12 laporan

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	71.999.850,00
2	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	- Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	80.999.750,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 152.999.600,00</b>

Pihak Pertama  
**KEPALA PELAKSANA**  
**BPBD KAB. TANAH LAUT**

  
**H. MUH. KUSRI, SP**  
**Nip. 19690315 199803 1 012**

Pelaihari, 5 April 2019  
Pihak Kedua  
**Kasi Kedaruratan dan Logistik**

  
**HUSAIRI, A.Md**  
**Nip. 19660505 199002 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)( 21300) Pelaihari Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Yanuar, ST  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Muh. Kusri, SP  
Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala pelaksana

**H. MUH. KUSRI, SP**  
Nip. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 5 April 2019  
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

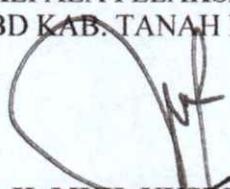
**AHMAD YANUAR, ST**  
Nip. 19660102 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KAB. TANAH LAUT**

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi korban pasca bencana	- Jumlah Masyarakat/ kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	6 Kali
2.	Melakukan monitoring pasca bencana	- Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec
3.	Melakukan Pembinaan pasca bencana	- Jumlah Desa / Kecamatan yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa/Kec

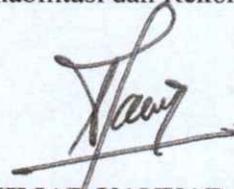
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	49.499.300,00
		- Peringatan Dini Bencana	49.498.900,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>RP. 98.998.200,00</b>

Pihak Pertama  
 KEPALA PELAKSANA  
 BPBD KAB. TANAH LAUT



**H. MUH. KUSRI, SP**  
 Nip. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 5 April 2019  
 Pihak Kedua  
 Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi



**AHMAD YANUAR, ST**  
 Nip. 19660102 199303 1 008

**POHON KINERJA BPBD  
KAB. TANAH LAUT  
TAHUN 2019**

Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan bencana terhadap masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Melakukan Layanan Administrasi Perkantoran  
Indikator :  
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP

2. Melakukan Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor  
Indikator :  
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan

3. Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor  
Indikator :  
Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan

4. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawalan  
Indikator :  
Jumlah Administrasi Kepegawalan yang dikelola sesuai ketentuan

5. Mengikuti Pameran Pembangunan  
Indikator :  
Jumlah Event yang di ikuti

1. Melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan  
Indikator :  
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan.

2. Menyusun laporan keuangan dan kinerja  
Indikator :  
- Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu  
- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

1. Melakukan sosialisasi Kewaspadaan dini bencana  
Indikator :  
Jumlah Masyarakat /kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi

2. Melakukan Pelatihan dan Simulasi  
Indikator :  
Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi

3. Mengikuti Pelatihan Teknis TRC/Pusdalops  
Indikator :  
Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat

4. Melakukan Pemantauan wilayah rawan bencana yang di dapat dari informasi BMKG, masyarakat, instansi terkait dan pemantauan secara langsung.  
Indikator :  
Jumlah Daerah Rawan Bencana

5. Melakukan Rekonsiliasi Data bencana  
Indikator :  
Jumlah Laporan Data bencana yang diupdate

6. Melakukan Pembinaan Desa Tangguh Bencana  
Indikator :  
Jumlah Desa Tangguh bencana

7. Pemenuhan Sarana posko Penanggulangan Bencana  
Indikator :  
Jumlah posko penanggulangan bencana di Kecamatan.

1. Melakukan layanan Penanganan Bencana  
Indikator :  
Bencana yang dilayani sesuai SOP

2. Memberikan Fasilitas Bantuan logistik dari BPBD dan Pihak terkait.  
Indikator :  
Jumlah Korban bencana yang menerima logistik

3. Pemenuhan sarana dan Prasarana / Peralatan Bencana  
Indikator :  
Jumlah Sarana dan Prasarana yang di penuhi sesuai dengan Standar Operasional

4. Melakukan Pemeliharaan peralatan Bencana  
Indikator :  
Jumlah Peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan

5. Melakukan Pendataan korban yang terdampak Bencana Alam  
Indikator :  
Jumlah data / Kejadian Korban yang terdampak Bencana

1. Memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Korban pasca bencana  
Indikator :  
Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi

2. Melakukan monitoring pasca bencana.  
Indikator :  
Jumlah lokasi yang terdampak pasca bencana.

3. Melakukan Pembinaan pasca bencana  
Indikator :  
Jumlah Desa/Kecamatan yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana

**CAPAIAN TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN PER TRIWULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masyarakat yang terdampak bencana	Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25,609,400	1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,090,900	Jumlah jenis (401 Jenis)	Triwulan I 78 Jenis Triwulan II 122 Jenis Triwulan III 150 Jenis Triwulan IV 51 Jenis Triwulan I 8 jenis Triwulan II 23 Jenis Triwulan III 55 Jenis Triwulan IV 9 Jenis
2	Meningkatkan partisipasi aparaturnya masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat /kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi  Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi  Jumlah tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat  Jumlah Daerah rawan bencana	275 orang  275 orang  35 orang  11 Kec	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  Program Peringatan Dini Bencana  Program Perlindungan Masyarakat	101,698,600  76,499,500	Pelatihan Kewaspadaan dini Bencana  Peringatan Dini Bencana  Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	52,199,700  49,498,900  76,499,500	Jumlah orang  Jumlah Orang  Jumlah Orang  Jumlah Kecamatan  Jumlah Laporan	Triwulan I - Triwulan II 275 orang Triwulan III - Triwulan IV - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III 275 Orang Triwulan IV - Triwulan I 0 Triwulan II 0 Triwulan III 0 Triwulan IV 0 Triwulan I 3 Kecamatan Triwulan II 3 Kecamatan Triwulan III 3 Kecamatan Triwulan IV 2 Kecamatan Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III 2 Laporan Triwulan IV 1 Laporan Triwulan I -

Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa					Jumlah Desa	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - -
Jumlah Posko penanggulangan bencana di kecamatan	5 Kec					Jumlah Unit	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - -
Bencana yang dilayani sesuai SOP	1 x 24 Jam		115,349,850	115,349,850	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Kejadian	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	42 Kejadian 35 Kejadian - -
Jumlah korban bencana yang menerima logistik	250 Paket					Jumlah Paket	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 Paket 100 Paket 200 Paket 425 paket
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi dengan standar operasional	27 buah					Jumlah Unit	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - 25 buah 27 buah
Jumlah Peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 buah		87,799,750	87,799,750	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	jumlah unit	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 24 buah
Jumlah Data / kejadian korban yang terdampak bencana	12 laporan					Jumlah Laporan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	180 orang					Jumlah Rapat	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 50 orang 50 orang -
Jumlah lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec		49,499,300	49,499,300	Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	Jumlah Monitoring	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 Kecamatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 2 Kecamatan
Jumlah Desa/Kecamatan yang dirahibilitasi	4 Desa					Jumlah Pelatihan	Triwulan I	-

Jang an Cita-cita  
melalui pelatihan,  
pendekatan sosial,  
Psikologis, ekonomi dan  
budaya pasca bencana

Triwulan II	-
Triwulan III	4 Desa
Triwulan IV	-



**Realisasi Capaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2014 - 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang terdampak bencana	75%	80%	80%	80%	80%
2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah deteksi bencana yang terbukti dapat ditanggulangi melalui informasi dari BMKG, masyarakat dan instansi terkait	12 Kejadian	500 Kejadian	110 Kejadian	185 kejadian	248 kejadian
		Jumlah Aparatur dalam pengurangan resiko bencana	43 orang	43 orang	50 orang	58 orang	58 orang
		Jumlah posko siaga bencana di kecamatan	-	1 kec	3 kec	5 kec	5 kec
3	Meningkatkan upaya penyediaan peralatan dan logistik dalam penanganan bencana	Jumlah waktu minimal untuk menanggulangi bencana	1 x 24 jam				
		Jumlah dukungan stock logistik yang tersedia berupa sandang, pangan dan petugas kesehatan yang disiapkan oleh stakeholder terkait dan didistribusikan kepada korban yang terdampak bencana	100 Paket	120 paket	140 paket	150 Paket	170 Paket
4	Meningkatkan upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan kewaspadaan pasca bencana	150 orang	150 orang	275 orang	275 Orang	275 orang
		Jumlah masyarakat dan aparatur yang terlatih dalam penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana	50 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang
		Persentase Evaluasi dan monitoring kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	-	-	90%	90%
5	Tertib tata kelola administrasi Pemerintahan	Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

Mengetahui,  
Kepala Relaksana BPBD  
Kabupaten Tanah Laut



H. MUBI KUSRI, SP  
NIP. 19690315 199803 1 012